



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2500ES807	01-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP / NIK : 0415782176044000  
A.2 NAMA : UTAMA JAYA KRANINDO  
A.3 NOMOR IDENTITAS : 0415782176044000000000 - UTAMA JAYA KRANINDO  
TEMPAT KEGIATAN  
USAHA (NITKU)

**B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh**

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	42.000.000	2	840.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas  
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya  
Tanggal : 31 Januari 2025

B.9 Nomor Dokumen : 61/Zona1/01/2025

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

**C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh**

C.1 NPWP / NIK : 0503524209002000  
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0503524209002000000000 - WASKITA - NINDYA - LRS KSO  
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : WASKITA - NINDYA - LRS KSO  
C.4 TANGGAL : 19 Februari 2025  
C.5 NAMA PENANDATANGAN : PAULUS BUDI KARTIKO  
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.